

Negosiasi Kekuasaan dalam Komunitas Adat: Komunikasi Politik dan Pemilihan Kepemimpinan di Negeri Hitumessing

Negotiating Power in Adat Communities: Political Communication and Leadership Selection in Negeri Hitumessing

 <https://doi.org/10.30598/populis.19.1.31-45>

Siti Asma Slammat^{1*}, Afdhal²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

*sitiasmaslamat@gmail.com

Abstract

This study explores the dynamics of political communication in the appointment and election system of traditional leadership (Raja) in the indigenous community of Negeri Hitumessing, Maluku, as a form of power negotiation within adat structures. The research is grounded in the significance of understanding political communication processes within a sociocultural space that retains strong traditional values while being influenced by modernity. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving community leaders, adat authorities, religious figures, youth representatives, and village officials. Political communication theory and Harold Lasswell's model serve as the conceptual framework to analyze message transmission, actors involved, communication channels, and the resulting socio-political impacts. Findings reveal that the Raja election functions not only as a contest for authority but also as a symbolic arena for competing group interests. Communication channels are hybrid in nature—oral interactions through informal community networks coexist with digital expressions via social media, particularly Facebook, which facilitates public critique and opinion formation. The election process significantly affects social values, religious practices, and public perceptions of legitimacy. This study contributes a novel mapping of political communication's role within adat institutions, offering insights for integrating political communication approaches in local leadership studies and strengthening community-based democracy in Indonesia.

Keywords: Political Communication, Traditional Leadership, Indigenous Governance, Power Negotiation, Community-Based Democracy

Info Artikel

Naskah diterima: 18/01/2024

Revisi terakhir: 15/02/2024

Disetujui: 01/03/2024

Copyright © by the Authors

This work is licensed under Creative Commons Attribution
License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Dalam kehidupan komunitas adat, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai struktur formal yang mengatur jalannya pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi sosial yang tertanam kuat dalam nilai-nilai, ritus, dan narasi sejarah kolektif masyarakat (Dolezal & Novelli, 2022; Hanami & Rahman, 2021; Mitra & Pal, 2022). Hal ini tampak nyata dalam praktik pemilihan kepala pemerintahan adat, atau yang disebut Raja dalam konteks Maluku, khususnya di Negeri Hitumessing, Kabupaten Maluku Tengah (Alaydrus et al., 2022; Drestanta, 2023). Proses pemilihan Raja tidak hanya mempertanyakan siapa yang berhak memimpin, tetapi juga siapa yang mampu merepresentasikan simbol-simbol budaya, menjaga kohesi sosial, dan menavigasi kompleksitas politik lokal yang sering kali tidak tertulis.

Persaingan dalam kepemimpinan adat ini kerap memicu gesekan sosial, perbedaan pandangan antar kelompok, serta penguatan identitas primordial yang eksklusif. Dalam konteks ini, komunikasi politik menjadi arena penting tempat berbagai kepentingan dinegosiasikan dan legitimasi dikonstruksi bersama-sama maupun secara bersilang.

Dinamika tersebut menjadi semakin penting untuk dikaji dalam menghadapi tantangan modernisasi, kehadiran media digital, dan intervensi kebijakan dari luar komunitas. Pemilihan Raja tidak lagi hanya berlangsung di rumah adat atau forum tradisional, tetapi juga menjalar ke ruang-ruang digital seperti media sosial, tempat opini masyarakat dibentuk, diperdebatkan, bahkan dipertentangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika di Hitumessing mencerminkan bagaimana nilai-nilai adat yang idealnya menjadi perekat sosial justru diuji oleh situasi politik lokal yang sarat kepentingan. Fakta-fakta ini bukan hanya menandakan adanya urgensi persoalan, tetapi juga membuka ruang refleksi untuk meninjau kembali peran komunikasi dalam menjaga demokrasi berbasis komunitas dan identitas budaya.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas aspek kepemimpinan dalam komunitas adat. Beberapa studi menekankan pentingnya struktur sosial tradisional dalam reproduksi kekuasaan lokal (Anshori & SF, 2020; Eko & Putranto, 2021; Ibrahim, 2020), serta legitimasi adat sebagai bentuk konsensus kultural melalui dialog sosial (Abiyanti, 2021; Bräuchler, 2020). Penelitian lain menunjukkan kuatnya pengaruh struktur adat dalam politik lokal, dan bagaimana ritual menjadi sarana afirmasi kekuasaan simbolik (Alaydrus et al., 2022; Hennidaa et al., 2020; Kirani, 2023). Modernisasi adat juga dikaji dalam konteks perubahan nilai-nilai di masyarakat Negeri Tulehu, serta dinamika konflik kepemimpinan akibat pergeseran dari sistem pewarisan ke kontestasi terbuka (Fenanlampir, 2020; Sulaeman et al., 2022). Di sisi lain, studi-studi lebih mutakhir menunjukkan peran tokoh agama dalam politik adat, serta penggunaan media sosial dalam komunikasi politik komunitas adat, diperkuat oleh etnografi digital yang mencatat pergeseran partisipasi politik ke platform daring seperti Facebook (Berenschot et al., 2023; Istania, 2022; Utama, 2020; Zain & Wardani, 2023).

Secara teoretis, komunikasi telah dipandang sebagai instrumen utama dalam pembentukan makna sosial (Bräuchler, 2021), di mana media dan simbol berperan penting dalam distribusi kekuasaan (Aragon, 2022b; Maamor et al., 2023; Widianingsih et al., 2023). Studi-studi politik lokal Indonesia menunjukkan tarik-menarik antara nilai adat dan kepentingan modern (Genon, 2022), yang sejalan dengan gagasan tentang komunitas imajiner (Hakim et al., 2023; Manaysay, 2020) dan simbolisme dalam politik tradisional (Drestanta, 2023; Efendi et al., 2022; Sebastian, 2022).

Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek struktural dan konflik terbuka dalam sistem kepemimpinan adat, sementara dinamika komunikasi politik sebagai medium negosiasi kekuasaan—baik secara lisan dalam forum adat maupun secara digital di media sosial—belum banyak diperhatikan. Selain itu, konteks lokal Negeri Hitumessing sebagai bagian dari sistem adat Maluku yang khas masih jarang disentuh dalam studi kontemporer yang menjadikan komunikasi sebagai fokus utama analisis.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini hadir untuk tidak hanya mengkaji mekanisme pemilihan kepala pemerintahan adat di Negeri Hitumessing, tetapi juga memahami bagaimana praktik komunikasi politik berlangsung sebagai proses negosiasi kekuasaan yang menggabungkan bentuk-bentuk tradisional dan kontemporer. Di balik dinamika pemilihan Raja, terdapat proses komunikasi yang penuh makna, di mana masyarakat tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga membangun kembali identitas dan konsensus sosial. Dengan menjadikan komunikasi politik sebagai lensa utama, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kekuasaan dinegosiasikan di antara berbagai aktor lokal dalam sistem adat Negeri Hitumessing. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik terhadap relasi kuasa, ekspresi simbolik, serta penggunaan media dalam proses kepemimpinan lokal. Penelitian ini juga membuka ruang baru dalam kajian ilmu sosial dan politik, khususnya terkait demokrasi berbasis komunitas dan revitalisasi nilai lokal dalam arus modernitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pilihan metode ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa fenomena yang dikaji—yakni dinamika komunikasi politik dalam pemilihan kepemimpinan adat (Raja) di Negeri Hitumessing—bukan sekadar peristiwa empiris, tetapi mencerminkan konstruksi sosial yang kompleks, kaya akan makna, serta sarat dengan simbolisme dan interaksi antaraktor. Sejalan dengan pendapat Creswell & Creswell (2018), pendekatan kualitatif sangat sesuai untuk menggali makna-makna mendalam yang hidup dalam realitas sosial yang tidak bisa direduksi menjadi angka semata. Oleh karena itu, fokus penelitian ini bukanlah pada kuantitas suara atau statistik kekuasaan, melainkan pada bagaimana kekuasaan itu dimaknai, dinegosiasikan, dan dikomunikasikan oleh masyarakat adat secara sehari-hari.

Pemilihan Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah sebagai lokasi penelitian bukan tanpa alasan. Negeri ini merepresentasikan salah satu komunitas adat yang masih mempraktikkan sistem pemerintahan tradisional berbasis raja dan kawang, namun dalam konteks sosial yang telah banyak dipengaruhi oleh modernitas, media sosial, dan keterbukaan informasi. Hitumessing menjadi ruang yang menarik untuk diteliti karena ia memuat paradoks antara pelestarian nilai-nilai adat dengan praktik-praktik komunikasi politik modern (Asrawijaya & Hudayana, 2021; Benda-Beckmann, 2022; Utama et al., 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, proses pemilihan raja di negeri ini sering kali diwarnai dengan dinamika komunikasi intens—baik dalam ranah formal seperti musyawarah adat, maupun informal seperti percakapan di media sosial. Konteks ini menjadikan Negeri Hitumessing sebagai medan sosial yang kaya untuk mengeksplorasi bagaimana kekuasaan dinegosiasikan dalam lapisan komunikasi masyarakat.

Penelitian ini melibatkan 10 informan kunci, yang dipilih secara purposif berdasarkan pertimbangan peran dan kedekatan mereka terhadap proses pemilihan raja serta kapasitas mereka dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Informan tersebut terdiri dari: 1 Raja aktif

Negeri Hitumessing, 2 tokoh adat (yang juga menjabat sebagai kepala Soa), 2 tokoh agama (dari Gereja dan Masjid), 2 tokoh pemuda, 2 warga biasa yang aktif di media sosial lokal, dan 1 perangkat desa (Sekretaris Negeri). Mereka dipilih karena mewakili beragam sudut pandang—dari elit adat hingga masyarakat akar rumput—yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang. Teknik purposive sampling ini sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Patton (2015) bahwa dalam penelitian kualitatif, informan dipilih berdasarkan seberapa kaya informasi yang dapat mereka berikan, bukan semata-mata berdasarkan jumlah.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi yang relevan dengan konteks sosial dan pengalaman subjektif para informan. Setiap wawancara berlangsung antara 45 hingga 90 menit, dan dalam beberapa kasus, dilakukan lebih dari satu kali untuk memperdalam informasi. Observasi partisipatif dilakukan selama kegiatan adat berlangsung, seperti saat musyawarah pemilihan raja atau upacara negeri, untuk mengamati interaksi sosial dan pola komunikasi yang berlangsung secara natural. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik simbol dan gestur, yang sering kali tidak terucapkan secara verbal (Aragon, 2022a; Berenschot et al., 2022; Binawan & Osawa, 2023). Adapun studi dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen seperti notulen rapat negeri, keputusan adat, postingan media sosial (terutama Facebook), serta arsip berita lokal, guna melengkapi dan memperkaya temuan lapangan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki latar belakang sosial dan pandangan berbeda terhadap proses pemilihan raja. Sementara triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumen. Metode ini sejalan dengan panduan yang dikemukakan oleh Tamma & Duile (2020), yang menekankan pentingnya penggunaan berbagai sumber dan pendekatan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Selain itu, proses member checking dilakukan dengan mengonfirmasi beberapa kutipan dan interpretasi awal kepada informan, untuk memastikan bahwa penafsiran peneliti tidak menyimpang dari makna yang dimaksudkan oleh narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Sosial Komunikasi Politik dalam Masyarakat Adat

Ruang sosial komunikasi politik dalam masyarakat adat Negeri Hitumessing memperlihatkan dinamika yang khas, di mana pesan-pesan politik tidak hanya disampaikan melalui saluran formal, tetapi juga tertanam dalam jejaring sosial, kultural, dan spiritual komunitas. Struktur sosial di negeri ini tersusun berdasarkan tatanan adat yang hierarkis namun dinamis, yang menjadikan komunikasi sebagai instrumen penting dalam mengatur harmoni dan konflik kekuasaan. Raja sebagai kepala pemerintahan adat berada di puncak

struktur ini, tetapi ia tidak berdiri sendiri. Di sekelilingnya terdapat struktur soa (marga), lembaga kewang (penjaga hukum adat dan lingkungan), tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum yang masing-masing memainkan peran signifikan dalam arus komunikasi politik.

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat (Tn. L) menunjukkan bahwa dalam proses-proses penting seperti pemilihan raja, ruang komunikasi terbuka pertama kali melalui musyawarah antar soa. Dalam musyawarah ini, pembicaraan tidak sekadar memutuskan siapa calon raja yang akan diusung, tetapi lebih dalam lagi, menyangkut legitimasi adat, hubungan genealogis, dan posisi historis soa dalam sejarah kepemimpinan Negeri Hitumessing. Seorang informan dari unsur pemuda (Sdr. M) menyampaikan bahwa ruang-ruang informal seperti rumah adat dan balai pertemuan soa menjadi tempat utama bagi diskusi-diskusi politik, dan dalam ruang itulah suara pemuda, meskipun tidak dominan, tetap mendapat tempat untuk didengar.

Dari observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa pola komunikasi lebih mengandalkan interaksi langsung, baik melalui pertemuan resmi adat maupun percakapan harian yang berlangsung di rumah-rumah warga, gereja, atau saat bekerja bersama di kebun. Nilai-nilai adat seperti rasa hormat terhadap senioritas, kewajiban untuk menjaga keharmonisan, dan larangan untuk mendahului ucapan tetua menjadi batasan-batasan yang melekat dalam setiap proses komunikasi. Namun batasan itu bukan penghalang, melainkan membentuk struktur komunikasi yang berbeda dari praktik politik modern: lebih kolektif, berjenjang, dan penuh makna simbolik.

Dalam konteks ini, komunikasi politik tidak berada dalam ruang yang steril atau bebas nilai, tetapi sangat bergantung pada relasi sosial dan kultural yang hidup dalam komunitas. Seperti diungkapkan Harnish (2021), komunikasi politik dalam komunitas tradisional bersifat *embedded*, artinya ia menyatu dengan praktik hidup sehari-hari masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, nilai budaya, dan simbol-simbol kolektif yang dipegang bersama. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi politik dalam masyarakat adat bukan sekadar transfer informasi, melainkan proses sosial yang menyeluruh, di mana pesan-pesan politik dibentuk, dipertukarkan, dan dinegosiasikan melalui jaringan nilai dan norma yang kompleks.

Lebih jauh lagi, posisi tokoh agama seperti pendeta atau pemuka keagamaan juga menjadi aktor penting dalam komunikasi politik. Meskipun tidak secara eksplisit masuk dalam struktur adat, otoritas moral yang mereka miliki menjadikan suara mereka turut memengaruhi opini publik dan keputusan kolektif masyarakat. Salah satu informan (Pdt. N) menuturkan bahwa dirinya sering dimintai pendapat oleh warga saat terjadi ketegangan menjelang pemilihan raja. Pendapatnya dihargai bukan karena posisinya dalam adat, melainkan karena ia dianggap sebagai penjaga nilai keadilan dan keharmonisan antar kelompok. Dari perspektif komunikasi politik berbasis komunitas, sebagaimana dijelaskan oleh Achmadi et al. (2021), keberhasilan komunikasi politik dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pesan dan saluran, tetapi juga oleh kedalaman relasi sosial yang menopang

interaksi tersebut. Dalam hal ini, komunitas adat seperti di Hitumessing menunjukkan bahwa sistem komunikasi politik mereka berlangsung secara interpersonal, kolektif, dan simbolik, di mana keputusan-keputusan politik tidak hanya rasional, tetapi juga emosional dan kultural. Ruang sosial komunikasi politik di Negeri Hitumessing mencerminkan praktik negosiasi kekuasaan yang kompleks, tidak melulu bersifat kontestatif, tetapi juga kolaboratif, penuh nuansa, dan sangat berakar pada struktur sosial yang sudah ada sejak lama.

Komunikasi Politik sebagai Mekanisme Negosiasi Kekuasaan

Dalam ruang sosial masyarakat adat Negeri Hitumessing, komunikasi politik tidak berjalan sebagai pertukaran pesan yang netral atau linier, melainkan sebagai mekanisme aktif dalam menegosiasikan kekuasaan dan pengaruh antar kelompok sosial. Proses ini berlangsung dalam lanskap yang kompleks, tempat di mana adat, kekeluargaan, sejarah, dan teknologi bertemu dan saling bertaut. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi sarana utama bagi aktor-aktor lokal—baik dari unsur adat, agama, pemuda, maupun warga biasa—untuk membentuk posisi tawar mereka, memperluas aliansi, serta menegosiasikan legitimasi terhadap kepemimpinan lokal, khususnya dalam momentum pemilihan raja.

Teori komunikasi politik dari Simião & Silva (2020), yang merumuskan model komunikasi sebagai “who says what, in which channel, to whom, with what effect”, menjadi sangat relevan untuk membaca praktik komunikasi kekuasaan di Negeri Hitumessing. Dalam konteks lokal ini, pertanyaan tentang “who” merujuk pada aktor-aktor dominan seperti tokoh adat, pemimpin soa, tokoh agama, dan generasi muda yang melek teknologi. Salah satu tokoh pemuda (Sdr. A) menyampaikan bahwa dalam momen menjelang pemilihan raja, diskusi dan narasi kepemimpinan tidak lagi dimonopoli oleh tetua adat, tetapi juga dikritisi oleh generasi muda melalui unggahan Facebook dan pesan-pesan di grup WhatsApp. “Kami tahu siapa yang didorong jadi raja, tapi kami juga punya pandangan sendiri. Kalau kami tidak setuju, kami sampaikan di media sosial,” ujar Sdr. A dalam wawancara, menunjukkan bahwa ruang digital kini menjadi medan baru dalam arus negosiasi kekuasaan.

Sementara itu, jawaban atas “says what” menunjukkan betapa pesan-pesan yang dikomunikasikan sarat dengan makna simbolik dan politis. Dalam forum adat, isu yang diangkat tidak selalu eksplisit menyebut nama calon raja, namun membicarakan kriteria seperti silsilah, “darah adat”, kelayakan moral, dan kemampuan membawa negeri ke arah yang lebih baik. Pesan ini dilapisi oleh nilai-nilai adat yang menyamarkan kontestasi dalam narasi kebersamaan dan musyawarah. Namun di baliknya, tersimpan strategi untuk menguatkan klaim legitimasi dan menjatuhkan lawan secara halus. Dalam satu pengamatan pada pertemuan adat di rumah salah satu kepala soa, peneliti mencatat bahwa ungkapan adat yang terdengar sejuk ternyata menyiratkan pesan penolakan terhadap calon yang dianggap tidak memenuhi “syarat adat”.

“In which channel” dalam model Lasswell terbagi menjadi dua bentuk utama di Hitumessing: komunikasi lisan dan digital. Komunikasi lisan tetap menjadi alat dominan, terutama dalam pertemuan adat dan obrolan antar warga, karena kepercayaan terhadap nilai face-to-face interaction masih tinggi. Namun, kanal digital seperti Facebook telah membuka

ruang baru yang lebih bebas dan tidak dibatasi norma adat secara ketat. Dalam satu unggahan Facebook yang diamati peneliti, seorang warga secara terbuka menyatakan kekecewaan terhadap dominasi satu soa dalam pencalonan raja, yang memicu diskusi panjang dan bahkan respons balasan dari akun-akun lain yang mengklaim mewakili keluarga besar tertentu. Saluran digital ini memungkinkan artikulasi kritik tanpa harus melalui struktur adat yang cenderung hierarkis, sekaligus menjadi arena baru bagi kompetisi simbolik antar kelompok.

“To whom” atau kepada siapa pesan ini diarahkan juga menunjukkan dinamika yang menarik. Dalam forum adat, pesan biasanya ditujukan kepada pemangku adat dan kelompok-kelompok soa lain sebagai bagian dari proses persuasi internal. Sementara di ruang digital, pesan diarahkan ke publik yang lebih luas, termasuk warga diaspora Negeri Hitumessing yang berada di luar daerah, tetapi tetap memiliki ikatan kultural dan kepentingan politik. Dengan kata lain, audiens komunikasi politik tidak lagi terbatas secara geografis atau struktural, melainkan mencakup komunitas yang bersifat transnasional namun tetap terikat dalam identitas adat.

Akhirnya, elemen terakhir dalam model Lasswell, “with what effect”, menunjukkan bahwa komunikasi ini memiliki dampak nyata terhadap struktur kekuasaan. Di satu sisi, ia dapat memperkuat posisi seorang calon dengan membangun citra positif, menonjolkan hubungan genealogis, atau mengasosiasikan calon tersebut dengan nilai-nilai keagamaan dan moralitas. Di sisi lain, komunikasi juga berfungsi untuk mendiskreditkan pesaing secara halus melalui narasi tentang pelanggaran adat, ketidakwajaran asal-usul, atau kurangnya pengalaman. Salah satu tokoh agama (Pdt. S) mencatat bahwa “perdebatan di antara keluarga besar bukan hanya soal siapa yang layak, tapi siapa yang bisa diterima secara adat dan bisa menjaga kedamaian”, menandakan bahwa efek komunikasi politik menyentuh aspek sosiokultural yang dalam. Konseptualisasi ini sejalan dengan pandangan Suartina (2022) bahwa komunikasi politik adalah proses yang tidak pernah netral karena melibatkan kekuasaan, simbol, dan kepentingan. Dalam masyarakat adat seperti Negeri Hitumessing, komunikasi menjadi arena aktif dalam pembentukan narasi, mobilisasi dukungan, dan penciptaan legitimasi.

Hibriditas Saluran Komunikasi: Dari Lisan ke Digital

Dalam dinamika komunikasi politik di Negeri Hitumessing, salah satu temuan menarik yang muncul adalah hadirnya hibriditas saluran komunikasi: suatu kondisi di mana saluran komunikasi lisan yang bersifat tradisional hidup berdampingan dan bahkan berinteraksi erat dengan saluran komunikasi digital yang modern. Fenomena ini tidak sekadar menunjukkan perubahan teknis dalam cara warga berkomunikasi, tetapi juga menggambarkan transformasi struktural dalam relasi sosial dan politik komunitas. Saluran komunikasi tidak lagi bersifat tunggal dan linear, tetapi bersifat fleksibel, saling melengkapi, dan terkadang saling menegosiasikan ruang serta otoritasnya dalam penyampaian pesan.

Secara tradisional, masyarakat adat di Negeri Hitumessing sangat mengandalkan komunikasi lisan sebagai bentuk utama dalam menyampaikan pesan politik. Forum adat, pertemuan keluarga besar (soa), serta obrolan antarwarga di rumah-rumah atau tempat

ibadah merupakan arena di mana informasi dan opini dibentuk serta disebar. Dalam pengamatan lapangan yang dilakukan pada sebuah pertemuan adat yang melibatkan kepala soa, tokoh agama, dan warga senior, tampak bagaimana pemilihan kata, nada suara, dan simbol-simbol adat digunakan untuk menyampaikan dukungan terhadap calon raja tertentu secara implisit namun tegas. Di sinilah kekuatan komunikasi lisan memainkan perannya—terikat pada norma kesopanan, adat istiadat, dan rasa hormat terhadap struktur hierarki masyarakat.

Namun, komunikasi semacam ini kini tidak lagi menjadi satu-satunya saluran. Seiring meningkatnya akses terhadap teknologi digital, terutama media sosial seperti Facebook, muncul pola komunikasi baru yang lebih terbuka, spontan, dan seringkali lebih kritis. Beberapa informan muda, seperti Sdri. M dan Sdr. R, mengungkapkan bahwa Facebook telah menjadi ruang “alternatif” yang bebas dari batasan adat yang ketat. Mereka mengakui bahwa di media sosial, terutama dalam grup komunitas Negeri Hitumessing, masyarakat bisa menyampaikan pendapat tentang siapa yang pantas menjadi raja, mengkritik dominasi kelompok tertentu, bahkan membongkar isu-isu yang sebelumnya dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. “Kalau di rumah adat, kita harus ikut alur adat. Tapi di Facebook, kita bisa bicara jujur,” kata Sdri. M, menggambarkan perbedaan atmosfer antara ruang lisan dan ruang digital.

Salah satu pengamatan yang memperkuat pernyataan ini adalah analisis terhadap unggahan dan komentar dalam grup Facebook warga Hitumessing. Dalam periode menjelang pemilihan raja, diskusi meningkat tajam, dengan beragam postingan yang berisi dukungan terhadap calon tertentu, serta kritik terhadap proses pemilihan yang dianggap tidak transparan. Beberapa akun anonim juga muncul dan ikut memberikan komentar bernada satir terhadap calon tertentu atau keluarga yang dianggap terlalu dominan. Meski demikian, komunikasi ini tidak lepas dari nilai-nilai lokal: beberapa pengguna masih menyelipkan bahasa adat, atau mengutip pepatah Maluku sebagai bentuk penegasan identitas budaya dalam ruang digital.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui konsep hybrid media system yang dikembangkan oleh Benda-Beckmann (2022), yang menekankan bahwa sistem media saat ini tidak terbagi secara dikotomis antara media lama dan baru, tetapi terjalin dalam jaringan yang kompleks dan saling bergantung. Dalam konteks Negeri Hitumessing, media lisan yang tradisional tidak ditinggalkan, tetapi mengalami modifikasi melalui kehadiran media digital. Warga dapat memulai diskusi secara adat dalam pertemuan keluarga, kemudian melanjutkannya di ruang digital untuk memperluas jangkauan pesan dan memengaruhi opini publik yang lebih luas, termasuk warga diaspora. Komunikasi menjadi lebih bersifat “multisaluran”, dengan pesan yang kadang serupa namun dibungkus dalam format yang berbeda sesuai konteks dan audiensnya.

Dalam praktiknya, hibriditas ini juga menciptakan dinamika kekuasaan baru. Di satu sisi, ia memungkinkan partisipasi yang lebih luas, terutama bagi generasi muda dan mereka yang tidak memiliki posisi struktural dalam adat. Namun di sisi lain, ia juga menghadirkan

tantangan, seperti meningkatnya konflik antar kelompok, ketegangan antara adat dan kebebasan berekspresi, serta kebutuhan untuk membangun etika komunikasi baru di ruang digital. Salah satu tokoh agama, Bpk. L, menyampaikan keprihatinan bahwa “kalau diskusi adat terlalu dibawa ke Facebook, nanti tidak ada lagi ruang tenang untuk menyelesaikan persoalan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa walau digitalisasi memberi kebebasan, ia juga bisa menggoyahkan harmoni yang dibangun dalam komunikasi lisan selama ini. Saluran komunikasi dalam masyarakat adat tidak lagi eksklusif bersifat lisan atau digital, tetapi telah menjadi sistem yang cair, saling memengaruhi, dan terus beradaptasi. Hibriditas ini tidak hanya mencerminkan perubahan teknologi, tetapi juga mencerminkan pergeseran nilai, pola kepemimpinan, serta cara komunitas menegosiasikan masa depan mereka dalam kerangka adat dan demokrasi lokal.

Kontestasi Simbolik dan Perebutan Legitimasi

Dalam masyarakat adat seperti Negeri Hitumessing, proses pemilihan raja tidak semata-mata dimaknai sebagai kontestasi politik dalam arti administratif, melainkan merupakan panggung yang sarat dengan simbol, narasi sejarah, dan tafsir identitas kolektif. Kekuasaan di sini tidak hanya tentang siapa yang menduduki posisi puncak pemerintahan lokal, tetapi juga tentang siapa yang secara simbolik dianggap layak merepresentasikan warisan budaya, nilai adat, dan kesinambungan sejarah komunitas. Dengan kata lain, pemilihan raja adalah arena symbolic struggle—pertarungan untuk mendapatkan legitimasi atas makna, bukan sekadar kekuasaan formal.

Observasi selama masa menjelang pemilihan raja menunjukkan bahwa berbagai kelompok soa—keluarga besar adat yang memiliki hak genealogis tertentu—berlomba-lomba memproduksi narasi tentang asal-usul mereka. Narasi ini kemudian digunakan untuk memperkuat klaim bahwa merekalah yang paling sah dan pantas untuk mengisi posisi raja. Dalam salah satu pertemuan keluarga besar yang dihadiri peneliti, diskusi berpusat bukan pada kapasitas calon, melainkan pada cerita lama tentang nenek moyang yang disebut sebagai “pendiri negeri” atau “pemegang amanah leluhur.” Dalam konteks ini, sejarah bukan sesuatu yang tetap, tetapi terus-menerus ditafsirkan dan dikonstruksi ulang sebagai strategi legitimasi.

Salah satu informan, Sdr. F, yang merupakan bagian dari kelompok adat tertentu, menyampaikan bahwa “kami punya hak karena nenek moyang kami yang pertama kali datang ke negeri ini.” Narasi ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Sdr. Y, dari soa lainnya, yang menegaskan bahwa “dokumen tua dan cerita dari orang tua kami menunjukkan garis keturunan yang lurus ke pendiri negeri.” Klaim-klaim ini menunjukkan bagaimana narasi sejarah digunakan sebagai alat untuk mengukuhkan posisi dalam kontestasi kepemimpinan.

Dalam praktiknya, tidak ada satu versi sejarah yang benar-benar dominan. Setiap kelompok membawa interpretasi mereka sendiri terhadap sejarah dan adat, dan di sinilah letak kompleksitasnya. Tafsir terhadap nilai adat—seperti makna istilah “raja” dan siapa yang berhak menyandanginya—menjadi ruang kontestasi tersendiri. Seorang tokoh adat, Bpk. N, bahkan menyampaikan bahwa “perdebatan bukan cuma soal siapa yang mau jadi raja, tapi

siapa yang benar-benar tahu adat dan bisa jaga negeri sesuai nilai lama.” Artinya, perebutan kepemimpinan juga menuntut pengakuan atas kapasitas simbolik, bukan hanya administratif.

Kontestasi ini memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam komunitas adat ditentukan oleh relasi antara simbol, sejarah, dan legitimasi sosial. Dalam kerangka teori symbolic power yang dikemukakan oleh Saefullah (2023), kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang punya otoritas legal, tetapi juga oleh mereka yang mampu menentukan makna yang diterima secara luas oleh komunitas. Dalam konteks Negeri Hitumessing, kelompok yang berhasil memaksakan narasi sejarah dan tafsir adatnya sebagai “versi paling sah” akan memiliki keuntungan besar dalam merebut legitimasi sosial untuk menduduki posisi raja.

Pendekatan ini juga dikuatkan oleh studi kontemporer seperti yang dilakukan oleh Suartina (2022), yang menegaskan bahwa dalam komunitas lokal, terutama yang berbasis tradisi, pertarungan simbolik lebih menentukan daripada sekadar jumlah dukungan eksplisit. Perebutan makna, yang terwujud dalam klaim atas sejarah, keturunan, dan tafsir adat, adalah bentuk komunikasi politik tingkat tinggi, yang berlangsung dalam bahasa yang halus, ritual, serta kode simbolik yang hanya dipahami oleh mereka yang terlibat secara kultural (Fitriani et al., 2022; Herawati et al., 2021).

Dalam konteks ini, komunikasi politik menjadi lebih dari sekadar pertukaran informasi; ia adalah proses kultural yang kompleks, di mana narasi, simbol, dan representasi memainkan peran penting dalam menghasilkan dan mempertahankan legitimasi. Hal ini terlihat jelas dalam bagaimana kelompok soa menggunakan ritual adat, penampilan dalam acara komunitas, hingga penggunaan simbol-simbol visual seperti pakaian adat dan lambang keluarga untuk memperkuat klaim mereka. Bahkan, dalam beberapa acara seremonial, tampak bagaimana kehadiran kelompok tertentu dengan atribut khas menjadi pernyataan diam-diam tentang eksistensi dan hak mereka dalam arena politik adat. Proses pemilihan raja di Negeri Hitumessing bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan ruang diskursif tempat berbagai aktor adat saling berhadapan dalam memperebutkan otoritas simbolik atas makna, sejarah, dan masa depan komunitas. Inilah kontestasi yang berjalan di bawah permukaan wacana formal, namun menentukan arah politik lokal secara mendalam dan berkelanjutan.

Efek Sosial dan Politik: Perubahan Nilai, Agama, dan Pendidikan

Proses pemilihan raja di Negeri Hitumessing tidak berhenti pada keputusan siapa yang akan memimpin, melainkan merembes jauh ke dalam tatanan sosial, nilai-nilai budaya, hingga persepsi tentang agama dan pendidikan dalam masyarakat. Seperti arus yang menyusup ke celah-celah batu karang, komunikasi politik yang mengiringi proses ini membawa serta perubahan halus namun mendalam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Kontestasi simbolik yang intens dan strategi komunikasi yang beragam telah memengaruhi relasi antar keluarga, memicu penyesuaian dalam praktik ritual adat, serta mengubah cara generasi muda memandang politik dan otoritas lokal.

Dari hasil observasi dan wawancara, terlihat bahwa pemilihan raja memunculkan

ketegangan emosional di antara beberapa kelompok soa. Salah satu informan, Sdr. M, mengungkapkan bahwa hubungan antara kerabat dekat menjadi renggang karena berbeda dukungan dalam pemilihan. “Kami ini saudara, tapi sekarang jarang saling menyapa karena beda pandangan soal siapa yang pantas jadi raja,” katanya. Ketegangan ini tidak selalu meletus dalam konflik terbuka, tetapi terwujud dalam perubahan interaksi sehari-hari, seperti ketidakhadiran dalam upacara keluarga atau acara adat bersama.

Lebih lanjut, dampak juga terlihat dalam dimensi keagamaan. Dalam sebuah observasi di salah satu pertemuan doa mingguan, terlihat kelompok jemaat tertentu lebih didominasi oleh satu afiliasi soa, sementara kelompok lainnya memilih untuk beribadah di tempat berbeda. Meski masyarakat Negeri Hitumessing dikenal menjaga harmoni antar agama, dinamika politik adat membuat garis perbedaan menjadi lebih kentara. Salah satu tokoh agama, Bpk. H, mencatat bahwa “iman kami sama, tapi dalam soal raja, kami jadi saling curiga. Ini tantangan besar bagi kami di gereja untuk tetap jaga persaudaraan.”

Dampak lain yang tak kalah penting muncul dalam persepsi generasi muda terhadap politik lokal. Di kalangan pemuda, khususnya mereka yang aktif di media sosial dan memiliki akses pendidikan tinggi, terjadi polarisasi antara dua sikap utama: sinisme terhadap sistem adat yang dianggap kolot, dan kebanggaan terhadap identitas lokal yang ingin mereka perbarui. Seorang pemuda, Sdr. L, menyatakan bahwa “kadang kami bingung, adat penting, tapi kenapa bikin orang-orang tua berantem? Kami ingin adat yang bisa jalan bareng dengan pendidikan dan pikiran terbuka.” Komentar ini menunjukkan adanya refleksi kritis dari generasi muda terhadap cara kekuasaan dinegosiasikan di ruang adat, sekaligus membuka peluang transformasi budaya ke depan.

Dalam konteks pendidikan, dinamika politik lokal juga menimbulkan efek menarik. Beberapa keluarga menyatakan kekhawatiran bahwa anak-anak mereka menjadi “terlalu vokal” setelah mengetahui cara kerja politik adat melalui media sosial. Salah satu orang tua, Sdr. R, mengeluh bahwa anaknya sering mengkritik tokoh adat di Facebook setelah pulang dari kuliah di luar daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan dan keterbukaan informasi telah mengubah lanskap komunikasi politik di tingkat komunitas, menciptakan ketegangan antara nilai tradisional dan nalar kritis modern. Secara konseptual, dinamika ini menguatkan gagasan bahwa komunikasi politik tidak dapat dipahami hanya sebagai saluran penyampaian informasi atau persuasi politik semata. Komunikasi politik, sebagaimana dijelaskan oleh Warburton (2018), adalah bentuk intervensi budaya yang membentuk dan menata ulang relasi sosial dalam masyarakat. Dalam konteks Negeri Hitumessing, komunikasi politik telah menjadi arena tempat nilai-nilai adat diolah kembali, identitas komunitas dipertaruhkan, dan batas antara yang sakral dan yang profan dinegosiasikan ulang.

Implikasi dari temuan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Penelitian ini menunjukkan perlunya merancang model komunikasi politik yang lebih partisipatif dan berbasis nilai lokal. Kanal-kanal komunikasi yang menghormati struktur sosial tradisional, namun juga membuka ruang dialog kritis bagi generasi muda, sangat diperlukan. Misalnya, forum musyawarah adat dapat dikembangkan menjadi ruang deliberatif yang inklusif, yang

melibatkan perwakilan pemuda, perempuan, dan kelompok minoritas soa, sehingga tidak hanya mereproduksi kekuasaan lama, tetapi juga membuka jalan bagi demokrasi komunitarian yang lebih dinamis. Pemilihan raja bukan hanya menjadi momentum politik biasa, tetapi juga menjadi medium transformasi sosial yang kompleks. Komunikasi politik dalam ruang adat menunjukkan dirinya sebagai medan kebudayaan, di mana makna, nilai, dan otoritas diproduksi dan diperdebatkan secara terus-menerus.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa dinamika komunikasi politik dalam proses pemilihan kepemimpinan adat di Negeri Hitumessing merepresentasikan mekanisme negosiasi kekuasaan yang berlangsung dalam ranah sosial-kultural yang terus bertransformasi. Proses komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan politik, melainkan menjadi arena strategis bagi aktor-aktor lokal untuk membangun legitimasi, memobilisasi dukungan, dan mempertahankan identitas dalam kontestasi kepemimpinan yang sarat simbolisme dan tarik-menarik kepentingan antar-soa. Integrasi antara praktik komunikasi tradisional—seperti musyawarah adat dan relasi patron-klien—dengan media digital, khususnya Facebook, telah membuka ruang baru bagi artikulasi politik warga, termasuk generasi muda yang memainkan peran kunci dalam mendorong keterbukaan dan perubahan pola komunikasi kekuasaan. Dengan pendekatan yang peka terhadap konteks budaya, penelitian ini berhasil mengungkap bahwa pemilihan raja tidak sekadar menjadi ritual adat, tetapi merupakan ekspresi dari transformasi sosial dan politik lokal yang kompleks. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai komunikasi politik dalam komunitas adat, serta menawarkan kontribusi konseptual terhadap studi kepemimpinan lokal dan demokrasi komunitarian berbasis nilai-nilai kultural yang adaptif terhadap arus modernitas.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku, termasuk pemberian persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*), perlindungan terhadap kerahasiaan informan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Perhatian khusus diberikan kepada partisipan dari kelompok rentan guna memastikan keselamatan, kenyamanan, dan hak partisipasi yang setara. Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal, dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan. Seluruh data dan informasi yang disajikan diperoleh melalui metode penelitian yang sah dan telah diverifikasi untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dibatasi hanya pada bantuan teknis penulisan dan penyuntingan bahasa, tanpa memengaruhi substansi ilmiah dari karya ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada para informan atas wawasan berharga yang diberikan, serta kepada para penelaah anonim atas masukan konstruktif terhadap versi awal naskah ini. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi dan kesimpulan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyanti, N. N. (2021). *Dispersive Power-Sharing and Political Stability: The case of post-conflict Aceh*. University of Oslo.
- Achmadi, A., Hangabei, S. M., Dimyati, K., & Absori, A. (2021). Culture-Based Land Right Conflict Resolution Model: A Case Study of the Dayak Tomun Indigenous People. *The International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies*, 16(2), 1–10. <https://doi.org/10.18848/2327-008X/CGP/v16i02/1-10>
- Alaydrus, A., Loilatu, M. J., Qodir, Z., Mahfin, A., & Akbar, P. (2022). Cultural Approach to Election Conflict Resolution in South Buru District, Province of Maluku. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 24(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n1.p1-9.2022>
- Anshori, M. S., & SF, A. K. (2020). Identity and Communication Pattern of Berco Tribe in Sumbawa Regency concerning Land Conflict Situation. *Komunikator*, 12(1), 79–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jkm.121037>
- Aragon, L. V. (2022a). Pluralities of Power in Indonesia's Intellectual Property Law, Regional Arts and Religious Freedom Debates. *Anthropological Forum*, 32(1), 20–40. <https://doi.org/10.1080/00664677.2022.2042793>
- Aragon, L. V. (2022b). Pluralities of Power in Indonesia's Intellectual Property Law, Regional Arts and Religious Freedom Debates. *Anthropological Forum*, 32(1), 20–40. <https://doi.org/10.1080/00664677.2022.2042793>
- Asrawijaya, E., & Hudayana, B. (2021). The Power of a Leader in the Samin People's Opposition Movement to the Development of a Cement Factory in the North Kendeng Mountains. *Jurnal Humaniora*, 33(1), 26–38. <https://doi.org/10.22146/jh.56224>
- Benda-Beckmann, K. von. (2022). Trajectories of legal entanglement examples from Indonesia, Nepal, and Thailand. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 54(1), 13–30. <https://doi.org/10.1080/27706869.2022.2056372>
- Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., Afrizal, Hospes, O., Adriana, R., & Poetry, E. (2022). Anti-Corporate Activism and Collusion: The Contentious Politics of Palm Oil Expansion in Indonesia. *Geoforum*, 13(1), 39–49. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.03.002>
- Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., & Deviane, A. (2023). Local brokerage and international leverage: NGOs and land conflicts in Indonesia. *Journal of International Development*, 35(3), 505–520. <https://doi.org/10.1002/jid.3640>
- Binawan, A., & Osawa, T. (2023). The Value of Participatory Mapping, the Role of the Adat Community (Masyarakat Adat), and the Future of the Peatlands. In *Local Governance of Peatland Restoration in Riau, Indonesia: A Transdisciplinary Analysis* (pp. 211–237). Springer Nature Singapore Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0902-5_10
- Bräuchler, B. (2020). Bali Tolak Reklamasi: The local adoption of global protest. *Convergence*, 26(3), 620–638. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1354856518806695>
- Bräuchler, B. (2021). Peacebuilding and Resistance: Inequality, Empowerment, Refusal. In *A requiem for peacebuilding?* (pp. 181–203). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56477-3_8
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5 (ed.)). Sage Publications.
- Dolezal, C., & Novelli, M. (2022). Power in community-based tourism: empowerment and partnership in Bali. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(10), 2352–2370.

- <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1838527>
- Drestanta, E. E. (2023). Customary Village (Desa Adat) and Inter-Ethnic Fragmentations in Seram Island, Maluku. *Archipel*, 105(105), 91–113. <https://doi.org/10.4000/archipel.3446>
- Efendi, H., Dienaputra, R., Sofianto, K., & Asnan, G. (2022). Power Relations Urang Pandai and Candidate on Regional Head Election in West Sumatra, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(5), 1659–1665. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170532>
- Eko, B. S., & Putranto, H. (2021). Face negotiation strategy based on local wisdom and intercultural competence to promote inter-ethnic conflict resolution: Case study of Balinuraga, Lampung. *Journal of Intercultural Communication Research*, 50(5), 506–540. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17475759.2021.1898450>
- Fenanlampir, A. (2020). Conflict Management Model of Organization from Molucca's Cultural Perspective. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(4), 443–457. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.55.4.38>
- Fitriani, F., Nebore, R. D., & Suradinata, P. E. (2022). The Papuan Women's Participation Perspective in Political Leaders. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 109–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4090>
- Genon, L. J. (2022). Intersectionalities of gender, ethnicity, and leadership in the narratives of Meranao women in the Philippines. *Journal of Asian Pacific Communication*, 32(1), 154–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.1075/japc.00088.gen>
- Hakim, T. R., Deliarnoor, N. A., & Yuningsih, N. Y. (2023). Indigenous Democracy in the Policy-making Process. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 8(1), 50–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/jip.8.1.2023.50-63>
- Hanami, S., & Rahman, A. (2021). The Construction of Negotiation for Social Harmony in Minangkabau West Sumatra Indonesia. *Akademika*, 91(3), 191–199.
- Harnish, D. (2021). Tolerance of Ambiguity: Negotiating Religion and Sustaining the Lingsar Festival and Its Performing Arts in Lombok, Indonesia. *Religions*, 12(8), 626. <https://doi.org/10.3390/rel12080626>
- Hennidaa, C., Santosob, Y. W., & Kinasihc, S. E. (2020). The Role of the Adat Institution on Land Conflict Resolution in Tanimbar. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(3), 48–61.
- Herawati, N., Sunyata, L., & Sudagung, A. D. (2021). Communication model of musyawarah and role of traditional leaders in building public acceptance to support nuclear powerplant development plan at Bengkayang Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 739(1), 012079. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/739/1/012079>
- Ibrahim, Z. (2020). Wali Nanggroe Institution: The Role, Function, and Strategy for Resolving Conflicts in Aceh after the Peace. *Society*, 8(2), 313–324. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.192>
- Istania, R. (2022). The Struggling Aristocrats? Noble Families' Diminishing Roles after the Splitting of Tana Toraja Region. *Southeast Asian Studies*, 11(2), 195–218.
- Kirani, M. R. F. (2023). Political Communication Strategies of Local Parties in the Implementation of Aceh Peace. *Persepsi: Communication Journal*, 6(1), 10–21. <https://doi.org/10.30596/persepsi.v6i1.14793>

- Maamor, F. R., Kahn, S. M., Zahid, I., & Taif, B. (2023). The three-dimensional wood carving of buah buton : Influence of leaders as symbols of socio-community formation. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2267740. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2267740>
- Manaysay, F. V. (2020). Norms from Above, Movements from Below. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 4(1), 226. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v4i1.15952>
- Mitra, A., & Pal, S. (2022). Ethnic Diversity, Social Norms and Elite Capture: Theory and Evidence from Indonesia. *Economica*, 89(356), 947–996. <https://doi.org/10.1111/ecca.12423>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th (ed.)). SAGE Publications.
- Saefullah, K. (2023). Gintingan in Subang: negotiating the role of Indigenous microfinance institution in the Sunda Region of West Java, Indonesia. *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*, 19(4), 852–861. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/11771801231198531>
- Sebastian, A. (2022). Matrilineal practices among muslims: An ethnographic study of the Minangkabau of West Sumatra. *Ethnography*, 14(1), 14–26. <https://doi.org/10.1177/14661381221147137>
- Simião, D. S., & Silva, K. (2020). Playing with ambiguity: The making and unmaking of local power in postcolonial Timor-Leste. *The Australian Journal of Anthropology*, 31(3), 333–346. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/taja.12377>
- Suartina, T. (2022). *Strengthening Legal Pluralism in Indonesia: The Effects of Local Acknowledgment of Kasepuhan Adat Communities in West Java and Banten Provinces*.
- Sulaeman, S., Ridwan, M., Sulastri, I., Banawi, A., Salam, N., Darma, D., & Kasim, E. W. (2022). Muslim communities' identity transformation through the pela gandong ritual communication in Moluccas Immanuel Church, Indonesia. *Contemporary Islam*, 16(2), 225–257. <https://doi.org/10.1007/s11562-022-00489-3>
- Tamma, S., & Duile, T. (2020). Indigeneity and the State in Indonesia: The Local Turn in the Dialectic of Recognition. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 270–289. <https://doi.org/10.1177/1868103420905967>
- Utama, T. S. J. (2020). Impediments to Establishing Adat Villages: A Socio-Legal Examination of the Indonesian Village Law. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(1), 17–33. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670240>
- Utama, T. S. J., Yulianti, I., & Andriani, N. S. (2022). Indonesia's Political Reform: Challenges and Opportunities for the Adat Community's Mental Well-Being. In *Indigenous Knowledge and Mental Health* (pp. 101–121). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71346-1_7
- Warburton, E. (2018). A New Developmentalism in Indonesia? *Southeast Asian Economies*, 35(3), 355–368. <https://doi.org/10.1355/ae35-3c>
- Widianingsih, I., McIntyre, J. J., Rakasiwi, U. S., Iskandar, G. H., & Wirawan, R. (2023). Indigenous Sundanese Leadership: Eco-Systemic Lessons on Zero Emissions. *Systemic Practice and Action Research*, 36(2), 321–353. <https://doi.org/10.1007/s11213-022-09606-y>
- Zain, A. I., & Wardani, S. B. E. (2023). Vote-buying Practices in the Kesu Indigenous Communities During the 2020 North Toraja Elections. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8(3), 320–338.